Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(Survey pada Seluruh Dinas Pemerintahan Kota Bandung)

Hani Nurhayani

Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

The research was conducted in all government agencies Bandung. Problems that occur on the presentation of financial statements in the accountability of financial management that has not arranged neatly and publications that can not access by public.

The method used in this research is descriptive method of analysis and verification method. The unit of analysis in this study are all government offices in the city of Bandung with the number of respondents 43 respondents. The test statistic used is the calculation of multiple regression analysis, the coefficient of determination, hypothesis testing, and also use the help of an application program SPSS 18.0 for windows

Results this study show that the presentation of the financial statements, the financial statements to accessibility and accountability of financial management in all departments in the city government as a whole are included in both criteria, of all the indicators that describe the presentation of financial statements, accessibility and accountability of financial management. Presentation of financial statements, financial statements accessibility significantly affect the accountability of public financial management.

Then the effects simultaneous and partially as great an effect between the financial statement presentation and accessibility to financial statements for financial management accountability.

Keywords: Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements and Financial Management Accountability

I. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi seperti sekarang ini, *good governance* menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi setelah sekian lama rakyat Indonesia hidup dibawah sistem pemerintahan secara mendasar tidak berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam era reformasi ini, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan mendasar yang dimaksud ialah penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Di samping sebagai strategi untuk menghadapi era globalisasi, otonomi daerah merupakan suatu tuntutan lugas msyarakat bawah sebagai reksi atas ketidakadilan ekonomi yang mereka terima selama ini. Dengan adanya desakan untuk menerapkan otonomi daerah secara nyata, diharapkan bahwa didintegrasi yang selama ini mengancam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di republik ini, dapat diminimalisir. (Soesastro 2005:552)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalamiperubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebuttelah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yangdimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana,menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. (Soesastro 2005:554)

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, telah terjadi reformasi mendasar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan yang baru yaitu: Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya, berdasarkan survey ke sejumlah Pemerintah Daerah, pemerintah daerah tidak serta-merta dapat menyusun dua buah laporan keuangan baru tersebut, terutama neraca. Belum dimilikinya neraca oleh pemerintah daerah disebabkan, antara lain, karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut. Masalah lainnya adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum (Halim, 2002).

Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumennya yang berjudul "*Governance forSustainable Human Development, January 1997*", memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yaitu: *participation, rule of law,transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency andeffectiveness, accountability* serta *strategic vision*. Pemberlakuan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah kemudian menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat perwujudan *good governance* (Ulum, 2004).

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparasi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik. Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Stanbury, 2003).

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan).

Undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor publik sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders. Sebagai konsekuensinya, di berbagai negara, pelaporan eksternal sedang ditansformasikan agar lebih konsiten dengan kebutuhan akuntabilitas baru (Guthrie et al., 1998; Guarini, 1999; dalam Steccolini, 2002).

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, Haryanto (2007) dalam Rohman (2009).

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Terdapat penyusunan Laporan Keuangan yang belum tertata dengan rapih
2. akses laporan keuangan yang belum dapat dipublikasikan secara luas
3. Adanya kelemahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan
4. Pengelolaan Keuangan Daerah tidak didukung akuntabilitas yang baik.

Maksud dan tujuan di lakukannya penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada seluruh dinas Pemerintahan Kota Bandung.

Kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, adalah untuk digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam pelaporan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah, karena dengan mengetahui Sistem Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah ini, pemerintah dapat melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan dengan relevan dan akuntabel, yang sesuai dengan standar dan sistem yang sudah berlaku, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Mardiasmo (2004:37), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)
b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untukmemperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet) dan forum yang memberikan perhatian langsung atau petrenan yang mendoorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola desentralisasi secara transparan, ekonomi, efisien dan akuntabel. Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama, agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan konse *Value For Money* (VFM). Pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan konsep VFM tersebut adalah untuk menjamin dikelolanya uang rakyat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel agar pada akhirnya terwujud akuntabilitas publik (Soesastro 2005 : 553).

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut :

H1: Ada pengaruh yang signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

H2: Ada pengaruh yang signifikan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

H3 : Ada pengaruh yang signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalahPenyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di seluruh Dinas Pemerintahan Kota Bandung. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:19) adalah sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Sedangkan menurut Mashuri (2009:45**)** metode verifikatif adalah sebagai berikut:

> "Memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah

dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Karena penelitian menggunakan metode "kuesioner" maka data yang digunakan adalah data yang diambil dari sampel yang merupakan fakta-fakta dan keterangan yang ada di lapangan yang terjadi pada masa sekarang faktual dan penyebaran angket dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap jumlah unit.

Variabel yang terkandung dalam penelitian ini terdiri dari :

1. *Variabel Independent* (variabel bebas)
   Adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan menjadi penyebab atas sesuatu hal atau timbulnya masalah lain. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini yang merupakan veriabel bebas adalah Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan.
2. *Variabel Dependent* (variabel terikat)
   Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sesuai dengan pengertian tersebut maka yang menjadi variabel terikat adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Teknik sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2002: 60), yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adanya ketersediaan data di perusahaan, keterbatasan waktu penelitian, dan kemudahan memperoleh data.

Maka sampel data yang dipakai penulis adalah seluruh dinas yang berada di Pemerintahan kota Bandung yang sejumlah 17 dinas, di setiap dinas disebar 3 Kuesioner.

1. Setiap Dinas hanya mengizinkan 3 Kuesioner untuk di sebar,
2. Bagian staf yang berkompeten dalam bidang yang penelitian ini, yaitu Kasubag Akuntansi dan 2 staf bagian Akuntansi.

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Survei, Wawancara, Kuesioner dan Dokumentasi.

Pada penelitian ini dilakukan uji analisis regresi berganda Menurut Umi Narimawati (2008:5) mendefinisikan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

"Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangsn daerah.Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Imam Ghozali,2007).

- Hipotesis
  H_1 ; $\rho \neq 0$, Secara simultan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Kriteria Pengujian
  H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ (α = 0,05).

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif maupun negatif dan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan (Dajan,1991:403).

Untuk membuktikan apakah penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagi berikut :

Ho : $\rho \leq 0$:Penyajian tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Ha : $\rho > 0$:Penyajian berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Ho: $\rho \leq 0$:Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadapakuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Ha :$\rho > 0$:Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Kriteria Pengujian

a) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
b) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung > t tabel. Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan variabel penelitian yang menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang sebagai data primer. Kuesioner yang dibagikan terdiri dari 21 butir pertanyaan yang berhubungan dengan ketiga objek penelitian. Kuesioner ini dibagikan kepada 17 dinas yang masing-masing 3 buah kuesioner yang jumlahnya 51 kuesioner, akan tetapi hanya 43 buah kuesioner yang dijadikan penelitian oleh penulis.

Dari hasil deskriptif variabel x_1, yaitu penyajian laporan keuangan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden di tabel 4.1, tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Penyajian Laporan Keuanganadalah 1832. Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 11 pertanyaan adalah 2365. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 1832 atau 77,5% dari skor ideal yaitu 2365. Dengan demikian Penyajian Laporan Keuanganpada Dinas Kota Bandung secara unun berada pada kategori baik. Selanjutnya, jika pada indikator ada beberapa indikator yang menyatakan cukup, hal ini menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh dinas kota Bandung belum menunjukan hasil yang optimal. Indikator yang menyatakan cukup jika dilihat dari analisis tanggapan responden ini hanyalah indikator penyajian, namun indikator yang lain, seperti pengungkapan, pengakuan dan pengukuran berada padakategori baik, yang artinya bahwa pada variabel ini indikator-indokator tersebut telah berjalan sesuai dengan semetinya sesuai dengan standar yang berlaku pada saat penyajian laporan keuangan ini disajikan pada stakeholder atau masyarakat publik.

Dari hasil dskriptif variabel x_2, yaitu aksesibilitas laporan keuangan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden di tabel 4.2, tabel diatas menggambarkan tanggapan responden mengenai aksesibilitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Aksesibilitas Laporan Keuanganadalah 535.Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 4 pertanyaan adalah 860. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 535 atau 62,2% dari skor ideal yaitu 860. Dengan demikian Aksesibilitas Laporan Keuanganberada pada kategori cukup. Pada aksesibilitas ini presentasenya kecil, dikarenakan hasil tanggapan responden yang tidak maksimal dalam pengetahuan variabel ini. Secara garis besar, bila dilihat dari besarnya presentase bahwa akses untuk mengetahui laporan keuangan itu sangat tidak bisa. Dari keempat pertanyaan yang diajukan penulis hanya satu pertanyaan yang menyatakan kategori baik, yaitu laporan keuangan pada dinas di Pemerintahan Kota Bandung dapat diakses sebagian media publikasi, karena laporan keuangan yang bersifat rahasia, sehingga untuk publikasi ini hanya di sebagian media informasi. Namun, pada pertanyaan yang lainnya hanya berada dikategori cukup yang artinya bahwa laporan keuangandapat diakses oleh sebagian stakeholder, laporan keuangan hanya dapat tersdiauntuk pihak internal saja jika mereka membutuhkan dengan segera dan hanya dapat diakses dikalangan tertentu. Seperti, pihak investor, DPRD, Pemerintahan Pusat dangolongan tertentu yang bersinggungan langsung dengan laporan keuangan tersebut.

Dari hasil deskriptif variabel y, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil tanggapan responden di tabel 4.3, tabel diatas menggambarkan tanggapan responden mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan

hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerahadalah 996. Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 6 pertanyaan adalah 1290. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 996 atau 77,2% dari skor ideal yaitu 1290. Dengan demikian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerahberada pada kategori baik. Secara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terjadi sudah baik. Namun, indikator yang mencerminkan belum terjadnya kemaksimalan kinerja, masih ada yaitu indikator pengendalian. Jika dilihat dari hasil tersebut maka, hasil yang masih belum maksimal ditunjukan pada indikator pengendalian, pengendalian disini memilki arti bahwa pengendalian yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah masih cukup dan belum memiliki hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh publik pada pemerintahan daerah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya, pengendalian terhadap kedisiplinan diri, ini ditunjukan pada sikap pegawai yang sering datang telat ke kantor.

Pengaruh parsial diperoleh dengan mengalikan *standardized coefficient beta* dengan *zero-order*. Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh Penyajian Laporan Keuangan(X_1) terhada pAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y) secara parsial adalah sebesar 30,4%. Sedangkan besarnya pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y) secara parsial adalah sebesar 38,3%.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa :

1. Variabel X_1 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Karena nilai t hitung (5,025) > t tabel (2,021), maka Ho ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Penyajian Laporan Keuangan (X_1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y).
2. Variabel X_2 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Karena nilai t hitung (5,861) > t tabel (2,021), maka Ho ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y).

Aksesibilitas laporan keuangan (X_2) memiliki pengaruh lebih besar terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dibandingkan Penyajian laporan keuangan (X_1), hal ini dapat terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan akuntabilitas yang baik. Tuntutan dari sebuah akuntabilitas mewajibkan pemerintah daerah untuk tidak hanya melakukan pelaporan vertikal (pelaporan kepada pusat), namun juga pelaporan horizontal (pelaporan pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas) (Abdul Halim, 2012:20). Kondisi ini membuat informasi yang diberikan pada publik harus secara transparan dan sesuai dengan fakta yang berada di lapangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat berhak mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah daerah untuk membuat pemerintaha daerah ini menjadi lebih baik.

Untuk melihat pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y) digunakan analisis regresi linier berganda

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = -1{,}848 + 0{,}316\ X_1 + 0{,}568\ X_2}$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar -1,848. Artinya, jika variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebasnya yaitu Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) bernilai nol, maka besarnya rata-rata Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah akan bernilai -1,848.

Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah. Koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y). Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,316 mengandung arti untuk setiap pertambahan Penyajian Laporan Keuangan (X_1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y) sebesar 0,316.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y). Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,568mengandung arti untuk setiap pertambahan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y) sebesar 0,568.

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji F.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2), terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y).

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y).

Dari tabel 4.7, diperoleh nilai F hitung sebesar 43,968. Karena nilai F hitung (43,968) > F tabel (3,232), maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y).

Untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama antara Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y), digunakan analisis korelasi berganda (R)

Berdasarkan hasil output *software* tabel, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,829. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y).

Besarnya pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$= (0{,}829)^2 \times 100\% = 68{,}7\%$$

Artinya, variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan memberikan pengaruh sebesar 68,7% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah. Sedangkan sisanya sebesar 31,3% Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerahdapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Sisa dari presentase yang tidak diteliti, yaitu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daearah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penyajiian laporan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelelolaan keuangan daerah. Dalam penyajian laporan keuangan terdapat beberapa indikator yang merupakan proses dari penyajian laporan keuangan. Terdapat indikator yang belum maksimal dalam pelaksanaannya yaitu penyajian dalam proses penyajian laporan keuangan itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh belum terjadi karena laporan keuangan yang disajikan belum memenuhi standar-standar yang berlaku.
2. Aksesibilitas laporan keuangan ini mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih besar dibandingkan penyajian laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa laporan keuangan belum dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder. Sehingga publikasi ini tidak dapat diakses di seluruh media.
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini dapat dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan yang cukup besar. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini secara umum sudah berjalan baik, namun masih saja ada indikator yang belum memaksimalkan kinerjanya pada indikator pengendalian. Hasil ini menunjukan bahwa masih ada faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tidak diteliti oleh penulis.

Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi seluruh dinas Pemerintahan kota Bandung dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dapat disarankan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh para dinas, agar lebih mengikuti standar yang berlaku, yaitu standar akuntansi pemerintah. Hal ini dapat mencegah kesalahan penyajian dalam penyajian laporan keuangan.
2. Aksesibilitas laporan keuangan yang terjadi pada seluruh dinas di pemerintahan kota Bandung harus dapat diakses publik dengan mudah, agar tidak ada kesalahan manfaat kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengendalian dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum berjalan dengan baik, untuk memperbaiki hal ini, untuk para staf yang bekerja di seluruh Dinas agar lebih memperhatikan pengendalian yang bersifat preventif dan refresif. Agar tidak terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim,2002**,** *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah* Edisi pertama ,Salemba empat, Jakarta.

Abdul Halim,2012**,** *Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi ketiga , UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Al Rasyid, Harun, 1993, *Statistika Sosial*, Bandung, Program Pascasarjana Unpad

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Sut Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Azwar, Syaifuddin. 2003. *Reliabilitas dan Validitas*. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.

Harahap. (2004*) Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harahap. (2007*) Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ihyaul Ulum, MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadyah Malang.

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu

Kieso, Donal E dan Jerry J, Weygandt, 2001, *Akuntansi Intermedite*, Edisikesepuluh Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mulyana, Deddy. 2006*. Pengantar Ilmu Komunikasi*. 2002. Bandung: PT. RemajaRosdakarya
Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Regar, Moenaf H. (2009). Amburadul Jilid 2 : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Medan : USU Press
Rohman, A. (2009). *Kromatografi Untuk Analisis*. Edisi Ke I. Cetakan I. Graha Ilmu.
Soesastro, Hadi.dkk. 2005. Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Stanbury, P. F. Dan Whitaker. (2003*). Principle of Fermentation Technology*. Pergamon Press, Ltd., Oxford
Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?.*EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002.
Sudjana. 2002. *Metode Statistika.* Bandung: Tarsito.
Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
Sulistoni G. (2003) *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat:SOMASI
Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
Umi,Narimawati Dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi Dan Tugas Akhir.* Jakarta: Penerbit Genesis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wilson & Kattelus, "Accounting For Govermental and Non Profit Entities" 2002 13th Edition, Irwin,North America.
Winwin yadiati. (2007). *Teori Akuntansi suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana.

VII. LAMPIRAN

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Mengenai Penyajian Laporan Keuangan (X_1)

No	Pernyataan	Skor Total	Skor Ideal	Kategori
1	Pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung, bagaimana pengakuan dalam penyajian laporan keuangannya	182	215	Sangat Baik
		84.7		
2	Bagaimana pengakuan penyajian laporan keuangan dalam hal keterukuran ?	171	215	Baik
		79.5		
3	Dalam penyajian Laporan Keuangan tidak perlu terdapat pengakuan informasi keuangan ?	174	215	Baik
		80.9		
4	Jika pengakuan penyajian laporan keuangan tidak dapat diandalkan, apa yang akan terjadi pada laporan keuangan selanjutnya?	192	215	Sangat Baik
		89.3		
5	Struktur pelaporan keuangan dalam hal perolehan aktiva tetap, menggunakan nilai apa?	151	215	Baik
		70.2		
6	Bagaimana pengukuran nilai sekarang yang disajikan dalam laporan keuangan di tiap dinas Kota Bandung ?	156	215	Baik
		72.6		
7	Jika instansi mempunyai surat berharga, maka nilai pengukuran apa yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan ?	162	215	Baik
		75.3		
8	Bagimana pengukuran nilai bersih yang disajikan dalam laporan keuangan di tiap dinas Kota Bandung ?	178	215	Baik
		82.8		

9	Bagaimana pengukuran arus kas masa depan yang disajikan dalam laporan keuangan di tiap dinas Kota Bandung ?	173 80.5	215	Baik
10	Bagimana pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan di tiap dinas Kota Bandung ?	155 72.1	215	Baik
11	Bagimana penyajian yang disajikan dalam laporan keuangan di tiap dinas Kota Bandung ?	138 64.2	215	Cukup
Jumlah Skor Total		**Baik**		
Presentase Skor				

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013

Tabel 4.2
Tanggapan Responden MengenaiAksesibilitas Laporan Keuangan(X_2)

No	Pernyataan	Skor Total	Skor Ideal	Kategori
12	Bagaimana aksesibiltas dalam hal laporan keuangan yang terjadi pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung ?	133 61.9	215	Cukup
13	Bagaimana aksesibiltas dalam hal laporan keuangan yang terjadi pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung ?	112 52.1	215	Cukup
14	Bagaimana aksesibiltas dalam hal laporan keuangan yang terjadi pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung ?	156 72.6	215	Baik
15	Apakah laporan keuangan di Dinas Kota Bandung telah dapat diakses?	134 62.3	215	Cukup
Jumlah Skor Total		Cukup		
Persentase Skor				

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013

Tabel 4.3
Tanggapan Responden MengenaiAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y)

No	Pernyataan	Skor Total	Skor Ideal	Kategori
16	Bagaimana pengelolaan keuangan dearah yang terjadi pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung ?	163 75.8	215	Baik
17	Bagaimana pengelolaan keuangan dearah yang terjadi pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung ?	162 75.3	215	Baik
18	Apa yang akan terjadi jika pengelolaan dilakukan tidak dengan kejujuran?	194 90.2	215	Sangat Baik
19	Bagaimana pengelolaan keuangan dearah yang terjadi pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung ?	157 73.0	215	Baik
20	Bagaimana pengelolaan keuangan dearah yang terjadi pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung ?	174 80.9	215	Baik
21	Bagaimana pengelolaan keuangan dearah yang terjadi pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung ?	146 67.9	215	Cukup
Jumlah Skor Total		Baik		
Persentase Skor				

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013

Tabel 4.4
Besarnya Pengaruh Secara Parsial

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Correlations Zero-order	Besarnya Pengaruh Secara Parsial	Besarnya Pengaruh Secara Parsial (%)
X_1	0.470	0.647	0.304	30.4%
X_2	0.548	0.700	0.383	38.3%
Pengaruh Total			0,687	68,7%

Tabel 4.5
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	df	t tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
X1	5,025	40	2,021	0,000	Ho ditolak	Signifikan
X2	5,861			0,000	Ho ditolak	Signifikan

Tabel 4.6
Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Std.Error	T	Sig.
(Constant)	-1,848	1,995	-0,927	0,360
X1	0,316	0,063	5,025	0,000
X2	0,568	0,097	5,861	0,000

Tabel 4.7
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

F hitung	Df	F tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
43,968	df1 = 2 df2 = 40	3,232	0,000	Ho ditolak	Ada pengaruh (Signifikan)